

EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERMARTABAT DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Arhamuddin

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the Program Evaluation Movement Building Prosperous Village, Independent, and Dignity in District Pasangkayu. This type of research is qualitative. The informants as many as 5 people, including heads of Regional Development Planning Board, the Secretary of the Village 2 and Community Leaders were determined by purposive. Collecting data using observations, interviews, and documentation, while data analysis using data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results showed Program Movement Building Prosperous Village, Independent, and Dignity in District Pasangkayu not been effective, although it has shown its efficiency in terms of cost, can solve the problems of society, it is appropriate desires of the community and has been appropriately carried out in Sub Pasangkayu, but in terms of effectiveness time implementation still frequent delays and delays, in addition to the program has not run evenly to the entire community subdistrict Pasangkayu.

Keywords: *Evaluation, Public Policy, and Program Building a Prosperous Village Movement, Independent, and dignified.*

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks bernegara, kerja besar pembangunan diselenggarakan oleh para pemangku kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Dengan demikian, sebuah produk kebijakan, pada hakikatnya adalah instrumen perubahan sosial menuju tatanan dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sejak reformasi bergulir telah beberapa kali terjadi trobosan kebijakan politik yang dimaksudkan untuk menata ulang sistem pemerintahan Indonesia yang buruk sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Momentum otonomi daerah awal tahun 2000 disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap daerah dengan menggulirkan berbagai macam kebijakan program pembangunan dengan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yakni pendekatan *top*

down dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan bentuk *blue print strategy* (cetak biru) yakni pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan *bottom up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berlangsung secara efektif, maka setiap daerah yang memiliki keunikan masing-masing hendaknya dapat mengangkat kembali karakter aslinya yang biasa disebut hak asal usulnya. Hal ini merupakan sebuah isyarat yang kuat untuk mendorong pemerintahan di daerah mengangkat derajat pemerintahan di desa, yang semula sebagai objek menjadi subjek pembangunan yang mampu mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Olehnya

dibutuhkan sebuah keseriusan dari pemerintah daerah agar penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan sampai kepada level reformasi pemerintahan desa.

Desa adalah satuan administrasi pemerintahan yang terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak otonom berbasiskan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya desa tetap terintegasi dengan sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa baik dari segi administrasi maupun dari segi pembangunan desa serta pengelolaan potensi lokalnya untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

Di Indonesia pelaksanaan pembangunan hingga pada level pedesaan senantiasa terus dikembangkan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pada pemerintah kabupaten/kota. Daerah

Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu daerah kabupaten yang menganggap bahwa desa merupakan sebuah basis potensial dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2003 sudah merupakan daerah otonom baru di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Utara memiliki potensi pertanian yang cukup besar baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola oleh masyarakat dan secara keseluruhan potensi tersebut tersebar pada 59 Desa dan 4 kelurahan di 12 wilayah Kecamatan. Namun demikian, pada tahun 2009 perkembangan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya alam dan sosial budaya yang dimiliki daerah ini belum mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 24.224 jiwa atau sebanyak 6.056 Rumah Tangga Sasaran dan atau sekitar 17,63 persen penduduk mamuju utara yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1. Wilayah administrasi dan jumlah penduduk miskin mamuju utara 2009

No	Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah rumahtangga (RT)	Rumahtangga miskin (RTM)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarudu	5	13.519	3.283	649	2.596
2	Dapurang	5	12.182	2.901	612	2.448
3	Duripoku	4	4.828	1.156	260	1.040
4	Baras	6	15.906	3.692	519	2.076
5	Lariang	7	10.127	1.678	687	2.748
6	BuluTaba	7	7.277	2.651	285	1.140
7	Pasangkayu	6	20.108	5.465	675	2.700
8	Tikke Raya	5	14.600	3.539	427	1708
9	Pedongga	4	6.611	1.751	275	1.100
10	Bambalamotu	6	16.457	3.936	916	3.664

11	Bambaira	4	9.060	2.139	503	2.012
12	Sarjo	4	6.766	1.571	248	992
Jumlah		63	137.441	13.672	6.056	24.224

Sumber : BPS Mamuju Utara 2009

Berdasarkan asumsi inilah pada periode pemerintahan 2010-2015 pemerintah daerah melakukan sebuah terobosan dalam rangka upaya percepatan pembangunan perdesan dengan memadukan berbagai potensi baik yang ada pada pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat serta dukungan dari pihak swasta dalam pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2010-2015. Dimana Pemerintah Daerah melakukan sebuah terobosan yaitu melaksanakan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat (Gema d'Smart) sebagai sebuah grand strategy dalam pembangunan di kabupaten mamuju utara, dan pada tahun 2014 Kabupaten Mamuju Utara berhasil keluar dari status daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi pada periode pemerinthan 2010-2015 yaitu rata-rata mencapai 13%.

Pelaksanaankegiatan program GEMA d'SMART, pemerintah daerah memberikan bantuan dana khusus sebesar Rp 170.000.000,00 untuk masing-masing desa agar pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan melalui proses partisipatif seperti pembangunan jalan tani, jembatan, dan irigasi dapat terlaksana dengan baik berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa. Selain kegiatan fisik, pelaksanaan kegiatan program GEMA d'SMART merupakan salah satu bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi

kependudukan serta pembinaan terhadap masyarakat desa, hal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama dua hari di masing-masing desa yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan program.

Tujuan dari program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat adalah untuk mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama menggerakkan perekonomian desa, menguatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung dengan swadaya gotong royong masyarakat berbasis potensi dan keunggulan lokal yang tersedia.

Sebagai program pembangunan yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tentunya program ini sudah sangat menarik untuk dikaji dan dievaluasi. Se jauh mana capaian dari program ini dalam upaya pemerataan pembangunan serta pendekatan pelayanan masyarakat, dan dapat memperbaiki taraf hidup dan perekonomian masyarakat di pedesaan. Kecamatan Pasangkayu merupakan Kecamatan yang tertua di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 20.108 jiwa, dan 675 Rumah Tangga Miskin (RTM). Diketahui bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dikecamatan pasangkayu terdapat ada empat desa dan tiga diantaranya sudah pernah menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Program Gema Desa Smart dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 680.000.000,00 sepanjang tahun 2011-2015.

Table 2. Jumlah anggaran program gema desa smart di kecamatan pasangkayu periode tahun 2011-2015

TAHUN ANGGARAN	DESA	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
2011	-	
2012	-	
2013	Karya Bersama	Rp 170.000.000,00
2013	Pakava	Rp 170.000.000,00
2014	Gunung Sari	Rp 170.000.000,00
2015	Ako	Rp 170.000.000,00
Total	4 Desa	Rp 680.000.000,00

Sumber : BAPPEDA Mamuju Utara

Jika dijumlahkan sampai dengan tahun 2015, wilayah Kecamatan Pasangkayu sudah mendapatkan total anggaran Rp 680.000.000,00 melalui program Gema Desa Smart. Sebagai program pembangunan dan sekaligus sebagai program unggulan daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan yang sudah lama berjalan, tentunya program ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan dievaluasi dari perspektif ilmu kebijakan publik.

Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat merupakan salah satu program unggulan daerah kabupaten mamuju utara yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan masalah kemiskinan serta dapat mendekatkan pelayanan, hal ini menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara. Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat mencakup aspek partisipatif, transparan/akuntabel, dan berkelanjutan di masing-masing wilayah program.

Namun, sebagai sebuah kebijakan Program Unggulan Daerah dalam hal pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan masyarakat pedesaan mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Dari penjelasan yang ada di atas penting bagi penulis untuk melakukan

kajian lebih mendalam tentang proses pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat yang dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1987:20). Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan menurut (Sugiono, 2005:60) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang terbagi di beberapa desa yang berada di wilayah pesisir pantai dan desa yang berada pada wilayah dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan data di lapangan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat di kecamatan pasangkayu yang di tentukan secara *purposive Sampling* yaitu Kepala BAPPEDA Mamuju Utara, Camat Pasangkayu, Dua Orang kepala desa perwakilan dari empat desa yang dipilih, dan 1 (satu) Orang Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan member menilai secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan dan dijalankan sebelumnya. Evaluasi berfungsi untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana, sekaligus mengukur subjektif hasil-hasil atas pelaksanaan kegiatan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari tentang sesuatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, sehingga evaluasi dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan terhadap objek yang diukur berdasarkan ukuran tertentu. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn :2000:36).

Pada penelitian ini evaluasi yang dibahas adalah pada Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Pelaksanaan program kebijakan tersebut tentunya tidak berjalan mulus, maka untuk mengetahuinya menggunakan pendekatan dengan teori evaluasi yang di kemukakan oleh Dunn (2003:610) pendekatan

berdasarkan kriteria evaluasi terbagi atas enam indikator, yaitu diantaranya efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

1. Efektivitas

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada.

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu apakah hasil yang diinginkan telah dicapai dari pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan dengan Firman, S.P., M.P. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, menyatakan:

Hasil yang diinginkan sudah sesuai, di mana waktu pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati periode 2010-2015 dan itu sudah dilaksanakan (Hasil

wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah tepat waktu. Waktu pelaksanaan program tersebut dilaksanakan di masa kepemimpinan Bupati pada periode 2010-2015. Jadi program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah terlaksana tepat waktu.

Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat banyak memberikan manfaat bagi sasaran program, peneliti melihat informasi program ini memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan di pedesaan, sehingga tidak heran jika para stakeholder termasuk dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Utara menginginkan program ini dilanjutkan untuk periode-periode berikutnya.

Ketepatan waktu pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai juga dapat sesuai sebagaimana tujuannya. Hal tersebut diungkapkan oleh internal pemerintah Kabupaten Mamuju Utara bahwa program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dilaksanakan sejak tahun 2010 dan berakhir di tahun 2015 karena itu merupakan program unggulan dari bupati terpilih di periode tersebut, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan giat di akhir masa kepemimpinannya, sehingga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Menurut Subarsono (2006:113) evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan belum sesuai tujuan yang diinginkan sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah berjalan sesuai waktu.

Meskipun hasil yang dikemukakan menggambarkan bahwa pelaksanaan program

gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah sesuai waktu yang diinginkan, maka berbeda dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Hasil wawancara dengan Muh. Dai, Sekdes Ako, menyatakan bahwa:

Menurut kami belum sesuai waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat, dikarenakan sering terjadi pengunduran jadwal yang telah ditetapkan diawal (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan Muh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat belum sepenuhnya sesuai waktu, karena sempat ada pengunduran waktu pelaksanaannya (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Perbedaan yang dikatakan oleh pelaksana program yang dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara, khususnya pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah sesuai, karena dilakukan selama 5 tahun. Namun hal itu berbeda dengan pandangan masyarakat, bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat belum berjalan efektif disebabkan oleh beberapa hal seperti pelaksanaan yang kurang jelas, terdapatnya pengunduran waktu pelaksanaan. Pengunduran waktu pelaksanaan dikarenakan kebijakan ini diselenggarakan di semua Desa di Kecamatan Pasangkayu. Hal ini berdampak pada jadwal yang sering tertunda.

Selain itu, peneliti melihat di lapangan adanya keluhan masyarakat atas pencairan dana Gema D'smart. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak pahaman masyarakat atas mekanisme pencairan dana, di mana dana tersebut harus dipertanggungjawabkan

sehingga dalam memperoleh dana tersebut banyak syarat yang disediakan. Keterlambatan terjadi karena kebanyakan masyarakat yang kurang paham masalah administrasi, sehingga mereka data tanpa membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan. Namun hal ini dapat dilihat bahwa hal tersebut juga bukan kesalahan dari masyarakat, program ini seharusnya di sosialisasikan secara terus menerus agar masyarakat paham, sehingga pada pencairan dana mereka dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban.

Ketidak sesuaian tersebut disebabkan oleh pemahaman yang berbeda, namun masyarakat sebagai sasaran program berhak menilai bahwa efektivitas pelaksanaan program dalam hal waktu belum terlihat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat belum berjalan efektif dari segi waktu pelaksanaannya, seperti terjadi keterlambatan bahkan penundaan waktu pelaksanaan program yang membuat masyarakat harus menunggu pembanguana infrastruktur di kecamatan Pasangkayu.

2. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisien jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal. Penelitian ini melihat efisiensi dari seberapa banyak

usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Mulyadi Halim, Camat Pasangkayu, menyatakan bahwa:

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sebesar 170.000.000. Manfaatnya bagi masyarakat lebih mudah menjangkau lokasi perkebunannya karena jalan tani sudah dibuka dan diperbaiki (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah menunjukkan tingkat efisiensi, terutama masalah pendanaannya. Tingkat efisiensi itu dilihat dari dana yang digunakan hanya sedikit, sementara manfaatnya banyak untuk masyarakat di pedesaan. Manfaat dari program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sangat besar, yaitu terbangunnya infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, dan sebagainya yang tertuang dalam program.

Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat juga memberikan manfaat yang besar bagi petani, di mana keberadaan program ini dapat memberikan jalan bagi petani untuk menuju tempatnya bercocok tanam. Hal itu dilihat dari pembangunan dan pembukaan jalan bagi petani, dengan tujuan dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, baik dari *input*, proses maupun *outcome*-nya dan hal itu sudah dilakukan di semua desa yang menjadi sasaran program kebijakan ini.

Manfaat dari aspek pertanian tersebut tentunya memberikan dampak bagi kesejahteraan ekonomi petani, seperti mulai dari bahan baku yang akan diproses, dan kemudian dijual kembali yang tidak

membutuhkan waktu lama karena telah terbantu dengan adanya infrastruktur seperti jalan yang memudahkan proses pemasaran bahan baku yang berasal dari petani.

Keberhasilan yang didapatkan dari manfaat tersebut hanya membutuhkan dana pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat yang menggunakan dana stimulan hanya sebesar Rp. 170.000.000 dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Keberadaan dana tersebut juga membuat masyarakat terdorong untuk bekerja sama dalam bentuk gotong royong dalam proses percepatan pembangunan di desa, meskipun dalam pelaksanaan pembangunan Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dilakukan oleh SKPD-SKPD terkait, namun animo masyarakat sangat tinggi dalam merespon pelaksanaan program tersebut, seperti adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa, selain itu dalam hal pendanaan, program ini juga melibatkan perusahaan yang didukung oleh pemerintah setempat.

Hasil dan pembahasan yang dilekukan diperkuat dan dipertegas oleh hasil wawancara dengan Muh. Dai, Sekdes Ako, menyatakan bahwa:

Biaya yang dikeluarkan dalam program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat Rp. 170.000.000 yang diperuntukkan 9 titik pembangunan, dan cukup bermanfaat. Namun kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat menyediakan alat untuk digunakan agar dana yang digunakan dapat maksimal (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil itu juga dikatakan oleh Muh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan sangat fantastis, di mana hanya dengan dana stimulan 170 juta/desa mampu memacu animo masyarakat dalam membangun

desanya, di mana infrastruktur desa dengan anggaran yang minim mampu terbangun berkan swadaya masyarakat di Kecamatan Pasangkayu yang tumbuh lewat program ini (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Bersarnya manfaat yang diterima dari hasil pelaksanaan Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat di kecamatan Pasangkayu mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu keadaan infrastruktur di kecamatan Pasangkayu. Keberadaan program tersebut juga menimbulkan animo masyarakat untuk bergotong royong dalam pembangunan desa, pembangunan tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama dalam pembangunan dan adanya dana swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan terkait dengan efisiensi, maka disimpulkan bahwa efisiensi besaran dana dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah ditunjukkan, di mana dengan keberadaan dana yang secukupnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti hasil pelaksanaan program dapat memenuhi pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, dan sebagainya yang tertuang dalam program.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menekankan kecukupan pada seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan terkait ketepatan memecahkan masalah dalam penerapan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui

hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Firman, S.P., M.P. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, menyatakan:

Sangat jauh dampaknya, karena masalah infrastruktur di pedesaan sudah mulai terbangun dan membuat masyarakat memiliki rasa gotong royong dalam membangun desanya (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah memberikan dampak pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat selama ini, seperti masalah infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama jalan yang kurang layak. Namun sejak adanya pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu hal-hal tersebut dapat terpenuhi dan membuat masyarakat menjadi semangat dalam mendukung percepatan pembangunan di pedesaan, khususnya di Kecamatan Pasangkayu yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Hasil yang dikemukakan di atas juga mendapat pengakuan yang sama. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Mulyadi Halim, Camat Pasangkayu, menyatakan bahwa:

Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, karena masyarakat mendapat pelayanan dengan mudah seperti pembuatan KTP, KK, dan lain-lain. Selain itu infrastruktur jalan tani di desa sudah bagus, serta terbangunnya sikap gotong royong (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil tersebut dipertegas oleh hasil wawancara dengan Hasri, Sekdes Karya Bersama, menyatakan bahwa:

Sejauh ini program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah memecahkan masalah, tetapi masih sangat minim karena sasaran belum tepat (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan pedesaan. Selain itu program tersebut dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di kecamatan Pasangkayu.

Dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut dilihat dari adanya kemudahan dalam pelayanan publik, seperti KTP, KK, pelayanan kesehatan dan KB, dan pelayanan publik yang lainnya. Proses pelayanan yang cepat tersebut dilihat dari kemauan pemerintah daerah yang dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam mengimplementasikan program ini langsung turun ke lapangan. Bahkan untuk bertemu masyarakat, Bupati dan Wakilnya mengadakan tenda darurat di desa-desa sebagai sasaran Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Hal itu bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program sekaligus ingin menjangring aspirasi masyarakat terkait dengan perbaikan program. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengandenganMuh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat di Kecamatan Pasangkayu telah mampu memecahkan masalah di masyarakat, baik melalui pengobatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan dan keluhan-keluhan masyaraat tersampaikan dari mereka ke unsur muspida dan jajaran pemda melalui dialog (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa pemecahan masalah setelah pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah terlihat dengan adanya pemenuhan keluhan-keluhan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, seperti masalah pembangunan infrastruktur yang sudah ada sejak perogram dilaksanakan.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran. Perataan pada penelitian ini dilihat dari biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda dalam penerapan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui hal tersebut, makadapat dilihat hasil wawancara dengan Mulyadi Halim, Camat Pasangkayu, menyatakan bahwa:

Program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat ini sudah dikerjakan secara menyeluruh karena yang merencanakan usulan program adalah masyarakat sendiri (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Melihat hasil wawancara yang dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat sudah dilaksanakan secara merata di Kecamatan Pasangkayu. Hal itu dilaksanakan karena tujuan program yang ingin mempercepat pembangunan di pedesaan. Program ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu sebagaimana dikatakan informan dari internal pelaksana, bahwa pelaksanaan program gerakan

membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat dilakukan di semua Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat atas pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat, karena meskipun sudah dijalankan namun masih ada saja keluhan terhadap keberadaan program tersebut, sebagaimana yang dikatakan Muh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Untuk kecamatan pasangkayu program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat, belum merata ke seluruh masyarakat pasangkayu, di mana masyarakat kelurahan martajaya dan kelurahan pasangkayu tidak tersentuh program ini (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat di Kecamatan Pasangkayu belum dilaksanakan secara merata kepada seluruh desa dan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dianggap memiliki tujuan tersendiri dari pelaksana, seperti kepentingan sehingga tidak dilaksanakan secara merata. Hasil yang dikemukakan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat tidak dilaksanakan di semua kelurahan, karena terdapat 2 (dua) kelurahan yang belum tersentuh program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat, yaitu kelurahan martajaya dan pasangkayu.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat belum dilaksanakan secara merata untuk kelurahan, khususnya di Kecamatan Pasangkayu, karena masih terdapat dua kelurahan yang belum tersentu program, namun sudah dilaksanakan pada semua desase bagaimana tujuan program

untuk percepatan pembangunan di pedesaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Penelitian ini melihat responsivitas dari hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Muh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Belum sesuai karena waktu pelaksanaan yang begitu singkat, di mana pelayanan gratis hanya berlangsung setengah hari saja untuk desa yang masuk gema smart tahun anggaran 2015, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan program desa smart walau tidak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur dengan dana stimulan tetap berjalan (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah dilaksanakan, namun hal tersebut menurut masyarakat masih terlalu singkat dalam waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan yang singkat disebabkan oleh pelaksanaan program ini dilakukan diberbagai desa jadi waktu pelaksanaan di satu desa memiliki keterbatasan waktu. Hal tersebut memberikan anggapan bahwa pelaksanaan Program

Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu belum sesuai waktu yang ditentukan, meskipun dari segi keinginan masyarakat sudah terpenuhi, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur.

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Firman, S.P., M.P. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, *menyatakan sudah sesuai keinginan masyarakat, karena proses pembangunan di desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah desa (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).*

Menyimak dari hasil wawancara di atas bahwa Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut mendapat dukungan yang besar dari masyarakat. Hal itu tidak lain disebabkan oleh adanya aspirasi masyarakat yang tertuang dalam program, seperti aspirasi petani yang ingin dibukakan dan dibuatkan jalan tani, di mana hal itu sudah dilakukan melalui program Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu.

Keberadaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, hal itu dilihat dari adanya hasil pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat, seperti jalan dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah sesuai keinginan masyarakat, karena program tersebut dihasilkan dari aspirasi masyarakat

melaui musyawarah desa sehingga hasil pembangunan sesuai keinginan masyarakat.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan criteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan pada penelitian ini menekankan padahasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai sebagaimana yang dituangkan dalam Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Firman, S.P., M.P. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, menyatakan:

Sudah tepat dilakukan, karena kita ketahui bahwa kabupaten ini masih baru jadi perlu percepatan pembangunan yang dipusatkan dari desa, jadi sudah tepat program ini dilaksanakan (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Hasil yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah tepat sasaran, karena Kabupaten ini masih tergolong baru sehingga memerlukan percepatan pembangunan, di mana dalam mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan program unggulan yang memulai pembangunan dari desa yang tertuang dalam Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu.

Program Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah tepat dilakuka

di Kecamatan Pasangkayu, karena program memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menginginkan perubahan melalui pembangunan. Hal itu juga dapat dilihat di Kecamatan Pasangkayu, dimana masyarakatnya berkeinginan untuk menjalankan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu, yang ditunjukkan dengan dukungan dalam bentuk gotong royong dalam pembangunan.

Melihat hasil uraian tersebut, maka terlihat jelas bahwa Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah tepat dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu. Hal itu dapat juga dilihat dari hasil wawancara dengan Muh. Gunawan, Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Sudah tepat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat tapi masih belum maksimal, masih perlu kajian lebih mendalam tentang program ini sehingga mampu menyentuh masyarakat secara menyeluruh agar semua bisa merasakan manfaat program desa smart (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 05 Desember 2015).

Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah tepat dilaksanakan dan sudah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Pasangkayu. Keberadaan program tersebut membuat pembanguan di Kecamatan Pasangkayu bisa terjadi karena program tersebut memulai pembangunan dari desa, sehingga desa-desa diberdayakan dengan pelaksanaan program tersebut. Untuk itu peneliti melihat pelaksanaan program tersebut sudah tepat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa implementasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu sudah tepat

dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu, karena dengan keberadaan program tersebut dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama manfaat dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu belum berjalan efektif, meskipun sudah menunjukkan efisiensi dalam hal biaya, dapat memecahkan masalah masyarakat, sudah sesuai keinginan masyarakat dan sudah tepat dilaksanakan di Kecamatan Pasangkayu, namun dalam hal efektivitas waktu pelaksanaan masih sering terjadi penundaan dan keterlambatan, selain itu program juga belum dijalankan secara merata kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pasangkayu.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan, agar diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat di Kecamatan Pasangkayu diperlukan tingkat efektivitas dalam hal waktu pelaksanaan seperti menyesuaikan dengan jadwal dan tidak ada lagi penundaan dan keterlambatan waktu pelaksanaan. Selain itu perlunya keadilan dalam hal pemerataan pelaksanaan program, agar kedepan pelaksanaannya dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Pasangkayu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan

artikel ini tidak mungkin terlaksana apabila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehingga menjadi kehormatan untuk saya mengucapkan terimakasih kepada: Pembimbing I, Bapak Dr. Nasir Mangansing, M.Si. dan pembimbing II, Bapak Dr. Hasanuddin Mustari, M.Si. Semoga semua bentuk dukungan, dorongan dalam rangka penulisan artikel ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, N, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Mamuju Utara dalam Angka Tahun 2013
- Pedoman Umum Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 *tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 *tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*